# **MODEL KONVERGENSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

*Convergence Model Of Stunting Prevention Policy in South Buton Regency*

La Ode Farid Akhyar Hisanuddin1, La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin2\*, Rininta Andriani3

|  |  |
| --- | --- |
| 1Program Pascasarjana Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia.E-mail: laodefaridakhyar@gmail.com 2Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia.E-mail: syaiful80islamy@gmail.com3Program Pascasarjana Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, IndonesiaE-mail; rinintaandriani82@gmail.com**\*Korespondensi:**Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia. E-mail: rinintaandriani82@gmail.com**Riwayat Artikel:**Diterima tanggal 7 Februari 2019; Direvisi tanggal 21 Maret 2019; Disetujui tanggal 10 April 2019; Dipublikasi tanggal 1 Juni 2019.**Penerbit:**© The Author(s). 2019 **Open Access**Artikel ini telah didistribusikan berdasarkan atas ketentuan *Lisensi Internasional Creative Commons Attribution* *4.0*What if? Creative Commons Certification | **Abstract**Stunting is not only related to health problems, but it is related to various other conditions that do not directly affect health, such as low productivity of human resources. The right policy implementation model will greatly assist in preventing stunting in society. This study aimed to model the convergence of local government policies in stunting prevention efforts by paying attention to organizational and inter-organizational behaviour, lower control behaviour, and target group behaviour. The study used a qualitative design with a phenomenological approach. The data were collected through in-depth interviews with 14 informants, while the secondary data came from the relevant regional apparatus organizations (OPD) data. Then it was analyzed in several stages, namely the stage of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study were that behaviour and between organizations form a commitment to contribute to stunting prevention, then at the behavioural level the organization really understood the role and function in carrying out stunting prevention and control programs, and the behaviour of the target group showed different responses positively and negatively. So that, it could be concluded consistency of policy implementers must determine shared commitments and common goals in stunting prevention.**Keywords:** Model, Policy Convergence, Stunting Prevention**Abstrak**Stunting tidak hanya terkait dengan masalah Kesehatan tetapi terkait berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan, seperti rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Model implementasi kebijakan yang tepat akan sangat membantu dalam penanggulangan stunting di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model konvergennsi kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan stunting dengan memperhatikan perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada 14 orang informan, sedangkan data sekunder berasal dari data organsisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Data kemudian dianalisis dalam beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil memperlihatkan bahwa pada perilaku organisasi dan antar organisasi telah membentuk sebuah komitmen untuk berkoordinasi dan berkontribusi dalam penanggulangan stunting, kemudian pada perilaku birokrasi level sangat memahami peran dan fungsinya dalam menjalankan program pencegahan dan penanggulangan stunting, dan pada perilaku kelompok sasaran menunjukan respon yang berbeda-beda ada yang respon scara postif maupun negatif. Sehingga dapat disimpulkan konsistensi para implementor kebijakan harus terikat dalam komitmen bersama dan tujuan yang sama dalam penanggulangan stunting.**Kata Kunci:** Model, Konvergensi Kebijakan, Penanggulangan Stunting |

# **Pendahuluan**

*Stunting* (pendek) atau kurang gizi kronik adalah suatu bentuk lain dari kegagalan pertumbuhan. *World Health Organization* (WHO) mengartikan *stunting* adalah keadaan tubuh yang sangat pendek hingga melampaui defisit 2 SD di bawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional (Trihono et al., 2015). *Stunting* memiliki dampak pada anak mulai dari awal kehidupan anak dan akan berlanjut pada siklus hidup manusia.

*Stunting* berdampak buruk terhadap perkembangan otak anak. Pada awal kehidupan menyebabkan perlambatan dan pengurangan jumlah dan pengembangan sel otak dan organ lainnya (Alfarisi et al., 2019). *Stunting* pada usia sekolah akan mengakibatkan anak menjadi lemah secara kognitif dan kecerdasan fisik maupun mental. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut pertumbuhan linear tetapi juga perkembangan otak anak. *Stunting* pada anak-anak merupakan salah satu masalah yang cukup serius, karena dikaitkan dengan risiko angka kesakitan dan kematian yang lebih besar, obesitas, dan penyakit tidak menular di masa depan, orang dewasa yang pendek, buruknya perkembangan kognitif, dan rendahnya produktivitas serta pendapatan.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi (*stunting*), dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Ekayanthi & Suryani, 2019).

Terjadinya *Stunting*  dapat dipicu oleh beberapa faktor non medik seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang berpendidikan cenderung tidak mengalami *stunting* dibandingkan dengan anak yang lahir dengan orang tua yang berpendidikan rendah (Akombi et al., 2017). Status ekonomi juga berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian *stunting* pada anak usia 0-59 bulan. Anak dengan keluarga yang memiliki status ekonomi yang rendah cenderung mendapatkan asupan gizi yang kurang (Chirande et al., 2015). Dalam hasil penelitiannya Akombi et al., (2017) menunjukan bahwa kesehatan anak bergantung pada status sosial ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita.

Dalam mengatasi permasalahan gizi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Intervensi gizi baik yang bersifat langsung (spesifik) dan tidak langsung (sensitif) perlu dilakukan secara bersama-sama oleh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya (Haryanti & Hayati, 2019). Agar berdampak signifikan, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan konvergen dengan pendekatan multi sector (Hermawati & Sastrawan, 2020). Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kementerian/lembaga serta mitra pembangunan, bekerjasama bahu membahu dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Indonesia. Tidak hanya di tingkat pusat, konvergensi upaya pencegahan stunting juga harus terjadi di tingkat daerah sampai dengan tingkat desa.

Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencapai sasaran prioritas. Lenschow et al., (2005) secara khusus menyebutkan penyebab terjadinya konvergensi kemungkinan besar akan terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi sukarela atau tidak sukarela dari para aktor negara di kancah internasional saja tetapi juga oleh kecenderungan daerah domestik untuk bertindak terhadap satu dorongan tetapi tidak ke yang lain. Gani, (2021) mendefinisikan konvergensi sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan keluarga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam upaya menanggulangi kejadian stunting diwilayah hukumnya, mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, dimana tujuan ditetapkannya untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan Stunting.

Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum memberikan dampak yang positif bagi penurunan stunting terbukti angka prevalensi stunting pada tahun 2020 sebesar 27% justru meningkat menjadi 28,32% pada tahun 2021, sehingga dibutuhkan sebuah model konvergensi kebijakan yang dapat dijadikan rujukan untuk dapat diimplementasikan sehingga penurunan angka stunting dapat tercapai.

# **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada 14 orang informan, sedangkan data sekunder berasal dari data organsisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Data kemudian dianalisis dalam beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Sumber data diperoleh dari sumber dokumen, wawancara dan observasi langsung. Semua sumber bukti tersebut akan ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu sumber-sumber datanya ditentukan hanya pada sumber data yang dapat menjelaskan fokus-fokus penelitian yaitu Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Buton Selatan Selatan

# **Hasil dan Pembahasan**

Upaya yang dilakukan dalam aksi konvergensi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan yaitu pelaksanaan secara bersama-sama oleh seluruh OPD yang terlibat baik itu Dinas Kesehatan yang melaksanakan intervensi gizi spesifik dan OPD di luar Dinas Kesehatan yang terlibat melaksanakan intervensi gizi sensitif.

Secara garis besar berdasarkan ketentuan pelaksanaan aksi konvergensi kebijakan pencegahan stunting OPD yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yaitu melakukan kedua aksi (pencegahan) intervensi yaitu pencegahan (intervensi) gizi sepsifik dan pencegahan (intervensi) gizi sensitive secara bersama-sama.Tujuan pelaksanaan aksi konvergensi kebijakan pencegahan stunting secara bersama-sama oleh seluruh OPD yang terlibat yaitu melaksanakan program-program terkait oleh masing-masing OPD untuk mencapai percepatan pencegahan stunting melalui kebijakan yang konvergen.

1. Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi

Salah satu faktor aspek keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan adalah perilaku organisasi dan antar organisasi yang meliputi komitmen dan koordinasi.

Bentuk komitmen Kepala Daerah dan para stakeholder atau dinas terkait sebagaimana pernyataan komitmen yang telah ditandatangani Bupati Buton Selatan yang dijalankan dalam program percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Buton Selatan khususnya di desa lokus stunting. Implementasi kebijakan telah terealisasi dengan bukti pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan stunting melalui APBD yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Masing-masing OPD terkait dan dijalankan oleh pihak yang terkait dan berkomitmen untuk mengimplementasikan sesuai dengan fungsi dan perannya. Meskipun alokasi anggaran tersebut belum dapat mengakomodir semua kebutuhan yang ada sehingga ada beberapa OPD yang belum maksimal menjalankan fungsi dan perannya.

Oleh karena itu, komitmen yang kuat saja tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan dukungan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan. Sebab Alokasi Anggaran yang cukup menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang dijalankan Pemerintah. Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan oleh organisasi lintas sektor yang menjadi implementor kebijakan (Suhroh & Pradana, 2021).

Salah satu faktor urgen yang berpengaruh dalam jaringan antarorganisasi dan berpengaruh terhadap penentuan starategi ekonomi daerah adalah koordinasi (Rahmawati et al., 2020). Dalam menjalankan kebijakan yang ada ,Koordinasi dilakukan para stakeholder baik dalam hal perumusan program dan kegiatan yang akan dilakukan, pelaksanaan kegiatan di lapangan bahkan dalam hal pengambilan keputusan.

Menurut Malon dalam Rahmawati et al., (2020) koordinasi adalah tindakan yang saling ketergantunganuntuk mengelolah antara kegiatan. Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompleks memerlukan adanya koordinasi agar kegiatan dapat ,menghasilkan output yang maksimal (Borgatti & Everett, 2000). Kerumitan organisasi dapat menyebabkan koordinasi biasanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan bahwa koordinasi mereka dalam bentuk menyusun laporan hasil kegiatan baik itu pemeriksaan Ibu hamil, posyandu balita, maupun penyuluhan gizi di lapangan. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan yang selanjutnya akan menjadi rujukan dalam proses perumusan kegiatan selanjutnya.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Para informan juga mengatakan bahwa, koordinasi pelaksanaan program kegiatan penanggulangan stunting dilakukan melalui rapat-rapat yang difasilitasi oleh Bappeda termasuk rembuk stunting. Rapat koordinasi dilaksanakan pada saat sebelum dan sesudah melaksanakan setiap Aksi, Mulai dari aksi 1 sampai Aksi 8. Rapat yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan aksi bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan aksi dan rapat sesudah aksi dimaksudkan untuk melaporkan hasil pelakasanaan aksi.

Bentuk koordinasi dilakukan dalam aksi I sampai aksi 8, melibatkan semua tim stakeholder terkait termasuk kemenag, kita merumuskan yaitu desa mana saja yang menjadi lokus, dimana prevalensinya yang paling stunting, koordinasinya dilakukan melalui rapat-rapat yang difasilitasi oleh Bappeda termasuk rembuk stunting.

Pada rembuk stunting yang pernah diselenggarakan juga menghadirkan unsur di luar Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yakni akademisi dimana mereka memberikan masukan dan tanggapan terhadap program pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Buton Selatan.

Para informan menambahkan meskipun maksud dan tujuan akhir dari bentuk koordinasi ini tercapai namun dalam pelaksanaannya tetap saja menemui kendala. Salah satu kendala yang terjadi adalah tidak konsistennya para stakeholder menghadirkan perwakilan dalam setiap rapat koordinasi.

Misalnya dalam Rapat pertama yang dihadirkan adalah si A, namun rapat berikutnya yang hadir adalah si B, sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan *Miss Understanding* bagi yang mengikuti rapat berikutnya. Seharusnya yang hadir dalam setiap rapat harus konsisten orang yang sama sehingga pemahaman terhadap keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan akan sama pula.

Selain itu dalam kendala lain dalam melakukan koordinasi adalah tidak tersedianya system manajemen data sehingga kadang data yang disajikan juga berbeda, misalnya data keluarga yang menjadi lokus stunting yang harus mendapatkan intervensi sensitif dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam hal ini pembangunan sarana air bersih tidak ada data *By Name By Addres*. Jadi untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran, petugas dari Dinas PUPR harus turun ke lapangan didampingi Kepala Desa setempat untuk mendata ulang Keluarga mana saja yang berhak mendapatkan bantuan penanganan stunting. Padahal semestinya jika system manajemen data terintegrasi, petugas dari Dinas Terkait tidak mesti turun lagi ke lapangan untuk mendata ulang.

1. Perilaku Birokrasi Level Bawah

Selain Perilaku organisasi dan antarorganisasi, Salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan adalah perilaku birokrasi level bawah. Birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya. sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya.

Perilaku birokrasi level bawah yang dimaksudkan disini adalah kemampuan Petugas Kesehatan di Puskesmas, Kader yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Pemerintah Desa dan Dukun perkawinan/persalinan atau yang dikenal dengan istilah “Bisa” dalam menjalankan program kegiatan percepatan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan. Kemampuan Petugas Kesehatan di Puskesmas yang terdiri dari berbagai bidang diantaranya nutrisionis, penyuluh kesehatan, dan Dokter/perawat, Kader Posyandu, KPM, dan Tokoh adat/Bisa, dan Pengurus PKK sebagai implementor kebijakan percepatan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan sudah merupakan ketetapan dalam program ini.

Adapun hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa peran dan fungsi mereka dalam pencegahan dan penanganan stunting sebagai petugas kesehatan di lapangan adalah bagimana mengubah perilaku masyarakat utamanya Ibu dan Calon Ibu. Perilaku yang dimaksud di sini adalah pola makan dan pola asuh. Pola makan ketersedian makanan dan pengetahuan tentang kandungan makanan, sementara pola asuh adalah bagaimana ketersediaan makanan dan pengetahuan tenatng kandungan makanan tersebut di implementasikan.

Selanjutnya peneliti selanjutnya berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa para informan selaku implementor sudah melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing. Salah satunya “*Bisa*” perkawinan/melahirkan, dimana meskipun mereka telah diberikan sosialisasi tentang pencegahan stunting melalui Dinas Kesehatan namun sesunggunya “*Bisa*” telah menjalankan program pencegahan stunting ini melalui kearifan lokal jauh sebelum stunting dikenal masyarakat dan menjadi program pemerintah.

Kearifan lokal yang sangat berkaitan erat dengan penanganan stunting adalah prosesi *“Posuo”* , yaitu Upacara adat yang dilaksanakan ketika seorang perempuan telah beralih statusnya dari *kabuabua* atau gadis remaja. Pada prosesi posuo ini para remaja putri diberi pengetahuan tentang bagaimana perilaku seorang perempuan dalam memasuki bahtera rumah tangga, sebab peran perempuan dalam sebuah keluarga itu sangat penting dan berpengaruh, baik terhadap suami maupun keturunannya. Peran dan perilaku yang dimaksud adalah bagaimana seorang perempuan mempersiapkan diri sebagai istri dan terlebih lagi sebagai seorang ibu nantinya.

Selain ritual Posuo, setelah seorang perempuan menikah kemudian mengandung, ada lagi yang namanya ritual *Posipo* yaitu ritual adat tujuh bulanan kehamilan dalam menyambut kelahiran bayi. Dalam ritual posipo ini, perempuan hamil akan disuapi dengan sejumlah makanan yang dianggap akan membawa keberkahan sang ibu dan calon bayi pada trimester ketiga. Meskipun menurut informan 9, kandungan gizi dalam makanan posipo tersebut belumlah sempurna untuk mencukupi kebutuhan Ibu hamil, perlu adanya kombinasi dengan jenis makanan sehat lainnya sehingga kebutuhan gizi ibu hamil sepenuhnya dapat terpenuhi.

Kader Pembangunan Manusia dan Kader Posyandu, masing-masing telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik, dimana Kader Pembangunan Manusia melakukan pendataan secara detail berapa ibu hamil yang ada di desa dan berapa anak di desa yang berusia 0-4 bulan. Dalam menjalankan tugasnya, KPM terkadang langsung turun ke Desa tanpa terlebih dahulu melapor ke Pemerintah Desa. Hal disebabkan apabila mereka harus melapor ke desa terlebih dahulu akan memakan waktu dan proses yang cukup lama sehingga akan menghambat proses pendataan di lapangan.

Sementara Kader Posyandu yang melakukan peran dan fungsinya untuk mencari tahu siapa saja perempuan yang tengah mengandung, memastikan ibu yang mengandung memeriksakan kesehatannya ke puskesmas, memastikan para ibu yang memiliki balita di sekitar tempat tinggalnya rutin membawa balita mereka ke Posyandu, selain itu juga pada saat pelaksanaan kegiatan Posyandu para Kader Kepo diberi tanggunga jawab untuk membantu para tenaga kesehatan untuk mengukur dan mendata berat dan tinggi badan balita.

Informasi lain ditemukan bahwa Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Buton Selatan juga telah menjalankan program kegiatan pencegahan dan penanganan stunting dengan secara rutin kegiatan sosialisasi dan Pemberian Makanan Tambahan kepada anak di daerah lokus stunting. Namun kegiatan tersebut hanya dilakukan setahun sekali karena keterdiaan alokasi anggaran yang terbatas.

Berdasarkan uraian-uraian hasil wawancara serta pengamatan di lapangan disimpulkan bahwa para implementor tingkat bawah yakni para petugas kesehatan, “bisa”, Kader, KPM, Pengurus PKK sudah memahami peran dan fungsinya dalam menjalankan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan. Peran *Bhisa* sangat mendukung upaya peningkatan Kesehatan Ibu dan anak (Andriani, Rininta. La Ode, Syaiful, 2021), Walau demikian sebagian implementor khususnya kader-kader yang direkrut dari masyarakat masih perlu diberi pelatihan dan pembinaan secara berkala sehingga dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan. Selainnya itu juga profesionalisme aparat harus ditunjang dengan alokasi anggaran yang maksimal agar kegiatan yang mereka lakukan cepat dan tepat sasaran dalam mencegah dan menanggulangi stunting di Kabupaten Buton Selatan.

Kontrol organisasi berfungsi melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh staf, baik diluar maupun didalam lingkungan kerja sehingga staf dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hasil wawancara dengan informan didapatkan informasi bahwa yang melakukan kontrol terhadap semua pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait penanganan stunting adalah Bappeda selaku *leading sektor*. Kontrol organisasi tidak hanya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi laporan yang dilakukan setiap rapat-rapat koordinasi namun juga dengan turun langsung ke lapangan memeriksa sejauh mana kebenaran laporan yang diterima dari setiap OPD terkait.

Wawancara dengan beberapa informan menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari program dan kegiatan yang dijalankan oleh OPD mereka, laporan hasil pelaksanaan menjadi keharusan dalam setiap rapat-rapat koordinasi. Sementara dari hasil wawancara dengan informan lain mereka menyusun laporan secara berkala untuk diserahkan ke dinas terkait sebagai bahan evaluasi.

Berdasarkan uraian-uraian hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kontrol organisasi sudah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi *Leading Sektor* sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi kebijakan.

1. Perilaku Kelompok Sasaran

Selain perilaku organisasi dan antar organisasi serta perilaku kelompok sasaran, ada satu faktor lagi yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Buton Selatan yaitu perilaku kelompok sasaran yangmana dimensinya adalah respon positif dan respon negatif.

Perilaku kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif dan respon negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan baik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Tanpa dukungan kelompok sasaran maka kebijakan tidak akan maksimal dijalankan (Sabatier & Mazmanian, 1980).

Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat menerima dengan baik dan memberikan dukungan yang positif atas kebijakan yang dijalankan. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan informan 13 dan 14 yang mengatakan bahwa

“*Mereka merasa sangat dibantu dengan adanya program pemerintah dalam mencegah dan menangani stunting karena mereka dibantu tidak hanya dari sisi kesehatan saja tapi juga diberikan bantuan pembangunan sarana air bersih dan sanita dari Dinas terkait*.

Wawancara peneliti dengan informan 1 dan 8 didapatkan informasi bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan bappeda dan dinas kesehatan, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat sangat baik. Masyarakat selain mendapat pembelajaran tentang pentingnya pencegahan stunting bagi generasi emas khususnya di Kab.Buton Selatan, diharapkan pemuda-pemuda nya itu produktif dan mampu berdaya saing.

Selain itu respon masyarakat sangat baik juga karena disamping ada tematik program kemiskinan tetapi stunting juga ini menjadi program nasional dimana masyarakat merasakan langsung dampak positifnya, misalnya ada beberapa yang tadinya tidak memiliki sarana MCK, tidak ada Sarana air bersih dan sanitasi dengan adanya program spesifik pencegahan stunting semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Hasil wawancara peneliti dengan informan selaku implementor tingkat bawah mengatakan bahwa untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program kegiatan yang telah dilakukan oleh petugas kesehatan, masyarakat dalam hal ini ibu hamil dan ibu menyusui akan diberikan pertanyaa melalui media gambar, dimana dalam gambar tersebut memuat “isi piringku” yaitu satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein (baik nabati maupun hewani) dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat.

Petugas kesehatan akan meminta masyarakat menjelaskan apa saja “isi piringku” dan manfaat “isi piringku tersebut” serta apa saja yang masayarakat lakukan dengan isi piringku tersebut. Pertanyaan melalui gambar tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik terhadap program kegiatan yang telah dijalankan oleh petugas kesehatan di lapangan serta untuk mencari tahu apakah masyarakat sasaran yaitu para ibu hamil dan menyusui mengimplementasikan semua pengetahuan yang diberikan oleh petugas Kesehatan.

Adanya Respon Positif dan negatif dalam implementasi suatu kebijakan diibaratkan bagai sisi uang logam yang tidak dapat dipisahkan (Adair, 2008). Meskipun sebagian besar kelompok sasaran merespon dengan baik kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi stunting di Kabupaten Buton Selatan, namun tetap saja ada sebagian kecil dari kelompok sasaran yang kurang menerima kebijakan tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh informasi bahwa sebagian remaja putri takut untuk mengkonsumsi Tablet Tambah Darah. Ketakutan ini bermula dari adanya Informasi kasus “keracunan” TTB di salah satu Sekolah Menengah di Kabupaten tetangga yaitu tepatnya di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Hal tersebut juga senada dengan hasil wawancara peneliti dengan informan 1 dan 5 diperoleh informasi bahwa anggota kelompok sasaran yang kurang menerima program pencegahan dan penanggulangan stunting adalah remaja putri yang menerima bantuan Tablet Tambah Darah.

Peristiwa “keracunan” tersebut bukan berasal dari Tablet Tambah Darah melainkan kesalahan cara mengkonsumsi Tablet tersebut dimana sebagian besar siswi yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah tersebut dalam keadaan perut kosong. Padahal seharusnya Tablet tersebut dikonsumsi sesaat setelah makan karena didalamnya terdapat kandungan asam amino dan vitamin C yang cukup tinggi. Untuk mengantisipasi terulangnya kejadian tersebut maka petugas kesehatan mengubah pola konsumsi Tablet Tambah Darah tersebut tidak lagi dilakukan di sekolah pada saat dibagikan oleh petugas kesehatan melainkan pada malam hari tepat setelah makan.

Berdasarkan hasil uraian wawancara-wawancara di atas serta pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, meskipun didesain dengan sempurna dan diperuntukan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan masyarakat namun tetap saja akan ada respon atau dukungan negative dari kelompok sasaran kebijakan. Kurangnya pemahaman dan stigma negatif dari pemahaman dari masyarakat menjadi faktor penghambat keberhasilan suatu kebijakan, sehingga dibutuhkan komunikasi dan tindakan persuasif secara terus menerus sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah bagi masyarakat itu sendiri.

# **Kesimpulan**

Konvergensi Kebijakan penangulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait namun iplementasinya belum berjalan dengan baik, dengan masih meningkatnya angka Prevalensi Stunting dari tahun 2020 sebesar 27, % menjadi 28,32 % di tahun 2021.

Perilaku organisasi dan antarorganisasi dalam konvergensi kebijikan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan belum sesuai dengan komitmen dan koordinasi serta kurangnya kontribusi organisasi.

Perilaku birokrasi level bawah sudah menjalankan fungsi dan perannya dalam menjalankan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan. Para petugas kesehatan, “bisa”, Kader, KPM, Pengurus PKK sudah memahami peran dan fungsinya dalam menjalankan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan.

Perilaku kelompok sasaran diimplementasikan sesuai respon positif dan respon negatif. Respon masyarakat yang cenderung positif mengindikasikan bahwa mereka sudah sepenuhnya memahami isi kebijakan, meskipun di sisi lain respon negatif dari setiap kebijakan yang dibuat Pemerintah tidak dapat dipisahkan walaupun dengan skala yang cukup kecil sehingga diperlukan adanya tindakan persuasif dalam mensosialisasikan kebijakan kepada kelompok sasaran yang masih memiliki respon negatif

# **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih yang tak terhingga kami hanturkan kepada yang terhormat Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) telah memberikan dukungan anggaran penelitiantahun 2022, Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau atas dukungan dan motivasi yang diberikan, LPPM Universitas Dayanu Ikhsanuddin atas motivasi dan dukungan yang luar biasa, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan seluruh umat.

# **Daftar Rujukan**

Adair, J. (2008). *Kepemimpinan yang memotivasi*. Gramedia Pustaka utama.

Akombi, B. J., Agho, K. E., Hall, J. J., Merom, D., Astell-Burt, T., & Renzaho, A. (2017). Stunting and severe stunting among children under-5 years in Nigeria: A multilevel analysis. *BMC Pediatrics*, *17*(1), 1–16.

Alfarisi, R., Nurmalasari, Y., Nabilla, S., Dokter, P. P., Kedokteran, F., & Malahayati, U. (2019). Status gizi ibu hamil dapat menyebabkan kejadian stunting pada balita. *Jurnal Kebidanan*, *5*(3), 271–278.

Andriani, Rininta. La Ode, Syaiful, I. (2021). DESAIN KELEMBAGAAN DALAM KOLABORASI PENCEGAHAN KEMATIAN IBU SAAT PERSALINAN. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *6*(2), 150–159.

Borgatti, S. P., & Everett, M. G. (2000). Models of core/periphery structures. *Social Networks*, *21*(4), 375–395.

Chirande, L., Charwe, D., Mbwana, H., Victor, R., Kimboka, S., Issaka, A. I., Baines, S. K., Dibley, M. J., & Agho, K. E. (2015). Determinants of stunting and severe stunting among under-fives in Tanzania: evidence from the 2010 cross-sectional household survey. *BMC Pediatrics*, *15*(1), 1–13.

Ekayanthi, N. W. D., & Suryani, P. (2019). Edukasi Gizi pada Ibu Hamil Mencegah Stunting pada Kelas Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan*, *10*(3), 312–319.

Gani, A. A. (2021). *Studi Operasional Penurunan Stunting Melalui Upaya Konvergensi Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah*. Universitas Hasanuddin.

Haryanti, T., & Hayati, N. (2019). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting. *Jurnal HAM*, *10*(2), 249.

Hermawati, H., & Sastrawan, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, *8*(2), 48–54.

Lenschow, A., Liefferink, D., & Veenman, S. (2005). When the birds sing. A framework for analysing domestic factors behind policy convergence. *Journal of European Public Policy*, *12*(5), 797–816.

Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, *1*(1), 218–231.

Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, *8*(4), 538–560.

Suhroh, L., & Pradana, G. W. (2021). PERAN PEMERINTAH DESA KO’OLAN DALAM PENEKANAN STUNTING MELALUI PROGRAM GOPO (GOJEK POSYANDU) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANGKALAN. *Publika*, 93–104.

Trihono, T., Atmarita, A., Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Nurlinawati, I., Utami, N. H., & Tejayanti, T. (2015). *Pendek (stunting) di Indonesia, masalah dan solusinya*. Lembaga Penerbit Badan Litbangkes.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445–488.